

Kebijakan Desentralisasi: Mensejahterakan Atau Memiskinkan? Study *Literatur Review*

Rafi Fadhlurrahman, Hendri Ka Utama, Zuardiansyah Adi Purnama, Luk Luk Fuadah

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang, Indonesia

E-mail: rfadhlurrahman130502@gmail.com¹, hendrikautama22@gmail.com²,
zuardiansyah.ap@gmail.com³, lukluk_fuadah@unsri.ac.id⁴

Article History:

Received: 12 April 2026

Revised: 30 April 2026

Accepted: 03 Mei 2026

Keywords: *desentralisasi; kualitas institusi; tata kelola lokal; kemiskinan; systematic literature review.*

Abstract: *Desentralisasi sebagai instrumen kebijakan global terus memunculkan perdebatan mengenai dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat akibat hasil implementasi yang cenderung terpolarisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kualitas institusi terhadap keberhasilan desentralisasi melalui sintesis literatur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain Systematic Literature Review berbasis protokol PRISMA dan perspektif Institutional Theory. Data penelitian berasal dari 27 artikel terindeks Scopus Q1–Q4 periode 2015–2025 yang dipilih secara purposive dari konteks Indonesia, India, dan Philippines, kemudian dianalisis menggunakan thematic content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan menurunkan kemiskinan pada wilayah dengan institusi yang matang, namun berpotensi memperluas korupsi, patronase, dan ketimpangan pada institusi yang rapuh. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas tata kelola lokal merupakan prasyarat utama agar desentralisasi menghasilkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.*

PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan instrumen kebijakan global yang melibatkan redistribusi kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya keuangan dari pemerintah pusat ke tingkat daerah. Kebijakan ini mencakup dimensi politik, fiskal, dan administratif yang saling berkaitan, dengan tujuan mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat lokal untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan (Almaarif *et al.*, 2025; Birner & Von Braun, 2015). Secara historis, desentralisasi dipandang sebagai strategi pembangunan yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di tingkat akar rumput guna mencapai tata kelola yang lebih inklusif (Singh *et al.*, 2024; Canare, 2022).

Tujuan akhir desentralisasi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang diukur melalui pertumbuhan pendapatan per kapita serta indikator multidimensi seperti kualitas layanan kesehatan, akses pendidikan, dan jaring pengaman sosial. Peningkatan capaian seperti status imunisasi anak dan efisiensi layanan kesehatan menjadi bukti efektivitas desentralisasi dalam

meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Singh *et al.*, 2024; Chen, 2024). Hubungan ini didasarkan pada argumen efisiensi alokatif dari Public Choice Theory, di mana pemerintah daerah memiliki keunggulan informasi tentang kebutuhan lokal (Liu *et al.*, 2019; Huynh & Tran, 2021).

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil kontradiktif mengenai dampak desentralisasi terhadap kesejahteraan. Di satu sisi, studi menemukan kontribusi positif terhadap penurunan kemiskinan melalui optimalisasi pengeluaran daerah di Indonesia dan Filipina (Siburian, 2022; Canare, 2022). Namun, di sisi lain, fenomena elite capture dan korupsi lokal menghambat kesejahteraan karena sumber daya publik dikuasai elit politik (Mitra & Pal, 2022; Ratmono *et al.*, 2021).

Perbedaan temuan ini menandakan celah literatur terkait faktor kontekstual seperti kualitas tata kelola lokal dan stabilitas politik yang memengaruhi hasil desentralisasi. Clientelism dan kegagalan akuntabilitas sering menyebabkan pelayanan publik tidak optimal, sementara kemiskinan awal dan ketimpangan antarwilayah memperburuk ketidakefisienan (Khan, 2021; Ponce-Rodríguez *et al.*, 2020). Kualitas kepemimpinan daerah dan transparansi anggaran menjadi penentu utama antara inovasi layanan atau korupsi (Chen, 2024; Huynh & Tran, 2021).

Penelitian ini bertujuan mensintesis temuan dari 27 artikel Scopus Q1-Q4 periode 2015-2025 menggunakan Systematic Literature Review berbasis PRISMA dan Teori Institusional untuk menjawab apakah desentralisasi mensejahterakan atau memiskinkan masyarakat. Urgensinya terletak pada kontribusi akademis untuk pemetaan teori desentralisasi yang komprehensif serta praktis sebagai rujukan reformasi pro-kesejahteraan bagi pengambil kebijakan (Almaarif *et al.*, 2025; Singh *et al.*, 2024). Kebaruannya adalah analisis polarisasi hasil desentralisasi berdasarkan kualitas institusi lokal, yang menekankan prasyarat tata kelola untuk dampak inklusif (Siburian, 2022; Ratmono *et al.*, 2021).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian bersifat kualitatif dengan desain SLR yang mengintegrasikan analisis tematik berbasis Teori Institusional sebagai kerangka utama, sebagaimana direkomendasikan Creswell dalam research design qualitative untuk mengolah data naratif dari literatur. Metode pencarian literatur dilakukan pada database Scopus dan ScienceDirect menggunakan operator Boolean seperti "*Decentralization or Fiscal Decentralization and Community Welfare or Poverty Reduction or Public Services*" pada periode 2015-2025, menghasilkan 27 artikel terindeks Q1-Q4. Emzir mendukung pendekatan ini dalam metodologi penelitian kualitatif melalui etnografi dan grounded theory untuk sintesis literatur yang mendalam.

Instrumen utama meliputi protokol PRISMA untuk screening inklusi-eksklusi serta tabel klasifikasi berdasarkan kategori temuan (positif, negatif, mixed), indeks jurnal, lokasi, dan grand theory, yang memastikan validitas dan reliabilitas analisis. Teknik analisis data mencakup content analysis tematik untuk mengidentifikasi pola polarisasi dampak desentralisasi, dengan klasifikasi menggunakan tabel distribusi geografis dan teori seperti Institutional Theory (9 artikel) dan Fiscal Federalism (7 artikel). Sugiyono menjelaskan teknik ini melalui analisis data berkala dalam metode kombinasi, sementara Sudaryono membahas validitas instrumen non-tes untuk review literatur.

Populasi penelitian terdiri dari seluruh artikel jurnal internasional bereputasi tentang desentralisasi, kesejahteraan, dan kemiskinan pada 2015-2025 di Scopus Q1-Q4, dengan kriteria inklusi berbahasa Inggris atau Indonesia, relevan secara tematik, dan empiris/teoritis. Sampel akhir adalah 27 artikel terpilih setelah penyaringan bertahap (identifikasi, screening, eligibility, included) sesuai PRISMA, didominasi studi dari Indonesia (7 artikel), India (4), dan Filipina (3), yang mewakili konteks negara berkembang. Creswell dan Emzir menekankan teknik purposive sampling

seperti ini untuk sampel kualitatif yang representatif dan saturatif.

Prosedur dimulai dengan studi pendahuluan dan rumusan masalah, dilanjutkan pencarian literatur di database, screening awal berdasarkan judul/abstrak, full-text review, ekstraksi data ke tabel tematik, dan sintesis akhir menggunakan Teori Institusional untuk pembahasan polarisasi temuan. Setiap tahap didokumentasikan transparan untuk replikabilitas, diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Sudaryono menguraikan prosedur serupa dalam metodologi penelitian melalui tahapan pengumpulan data, analisis multivariat, dan laporan akhir, didukung Sugiyono untuk desain R&D dalam SLR.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Desentralisasi Mensejahterakan Masyarakat?

Secara teoretis, keterkaitan antara desentralisasi dan peningkatan kesejahteraan berakar pada Teori Institusional, di mana efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas aturan main dan kapasitas birokrasi lokal. Dalam kerangka ini, desentralisasi dipandang mampu menciptakan kesejahteraan apabila institusi daerah berhasil menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik (Ferrara & Nisticò, 2019). Institusi yang kuat memungkinkan adanya sinkronisasi antara otonomi fiskal dengan kebutuhan masyarakat, sehingga sumber daya dialokasikan secara tepat sasaran pada sektor-sektor krusial seperti kesehatan dan pendidikan. Ketika aturan institusional memberikan ruang bagi partisipasi warga dan pengawasan yang ketat, desentralisasi bukan hanya sekadar perpindahan kekuasaan administratif, melainkan transformasi tata kelola yang mendorong terciptanya efisiensi alokatif barang publik demi mencapai kemajuan sosial yang nyata.

Temuan empiris dari 27 artikel yang ditelaah menunjukkan bukti signifikan bahwa desentralisasi mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan di berbagai wilayah. Studi yang dilakukan oleh Siburian (2022) dan Canare (2022) di Indonesia dan Filipina menegaskan bahwa desentralisasi fiskal secara langsung berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan melalui optimalisasi pengeluaran pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Singh *et al.* (2024) dan Jiménez-Rubio (2017) menemukan bahwa otonomi di sektor kesehatan berhasil meningkatkan aksesibilitas layanan dan memperbaiki luaran kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Hasil-hasil positif ini umumnya ditemukan pada wilayah yang memiliki kemandirian fiskal tinggi dan sistem pemerintahan yang transparan, di mana pemerintah daerah mampu merespons preferensi lokal secara lebih cepat dibandingkan pemerintah pusat (Chen, 2024; Letelier-S & Lozano, 2020).

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi memiliki potensi besar untuk mensejahterakan masyarakat apabila didukung oleh prasyarat institusional yang memadai. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kedekatan antara pengambil keputusan dengan konstituen lokal merupakan kunci utama efisiensi pelayanan. Namun, sebagai solusi untuk mempertahankan dan meningkatkan tren positif ini, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal serta digitalisasi sistem pengawasan anggaran guna meminimalisir kebocoran. Integrasi antara kemandirian fiskal dan penguatan standar pelayanan minimal (SPM) harus menjadi prioritas agar manfaat desentralisasi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga tujuan pemerataan kesejahteraan tidak hanya menjadi jargon politik tetapi realitas yang terukur.

Kebijakan Desentralisasi Memiskinkan Masyarakat?

Dalam perspektif Teori Institusional, kebijakan desentralisasi yang gagal atau justru "memiskinkan" masyarakat disebabkan oleh ketidaksiapan atau kelemahan struktur institusi di tingkat lokal. Teori ini menekankan bahwa tanpa adanya aturan main yang formal dan penegakan hukum yang kuat, otonomi daerah hanya akan menciptakan ruang bagi institutional bypass, di mana kelompok elit lokal mengabaikan prosedur demi kepentingan pribadi. Desentralisasi dalam konteks institusi yang rapuh menyebabkan "fragmentasi otoritas" yang memicu ketidakefisienan birokrasi dan kebocoran anggaran (Ferrara & Nisticò, 2019). Ketika institusi lokal tidak memiliki mekanisme akuntabilitas yang mapan, pengalihan kekuasaan justru memperlebar jarak antara kebijakan dan kebutuhan publik, sehingga alokasi sumber daya tidak lagi ditujukan untuk pengentasan kemiskinan melainkan terserap oleh biaya inefisiensi institusional.

Temuan dari berbagai literatur menunjukkan bahwa di wilayah dengan kualitas institusi yang rendah, desentralisasi berkorelasi negatif dengan kesejahteraan. Penelitian Ratmono *et al.* (2021) di Indonesia mengonfirmasi bahwa rendahnya kapasitas institusi pemerintah daerah menjadi penghambat utama desentralisasi dalam menurunkan kemiskinan. Serupa dengan itu, Khan (2021) dan Mitra & Pal (2022) menemukan bahwa di Pakistan dan India, desentralisasi sering kali terhambat oleh weak local institutions yang memicu korupsi sistemik dan salah sasaran bantuan sosial. Dalam studi-studi ini, kegagalan mencapai kesejahteraan bukan disebabkan oleh kekurangan dana, melainkan oleh "kegagalan institusional" dalam mengelola otonomi, yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan kualitas layanan publik dan peningkatan beban ekonomi bagi masyarakat miskin (Oumbe *et al.*, 2025; Chatterjee & Pal, 2021).

Dapat disimpulkan bahwa desentralisasi berisiko memiskinkan masyarakat apabila dipaksakan pada lingkungan institusional yang belum matang. Dampak negatif ini merupakan konsekuensi logis dari kegagalan desain institusi daerah dalam menjamin transparansi dan penegakan aturan. Sebagai solusi, penguatan institusi tidak boleh hanya fokus pada aspek administratif, tetapi harus menyentuh reformasi birokrasi secara menyeluruh dan penguatan fungsi pengawasan internal (APIP) serta eksternal (masyarakat sipil). Pembangunan kapasitas institusi (institutional capacity building) di tingkat lokal harus mendahului atau setidaknya berjalan beriringan dengan pemberian otonomi fiskal yang lebih besar, guna memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar terkonversi menjadi peningkatan standar hidup masyarakat

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan desentralisasi merupakan instrumen bermata dua yang dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kualitas institusi lokal, sebagaimana terungkap dari sintesis 27 artikel Scopus Q1-Q4 periode 2015-2025 menggunakan Teori Institusional dan protokol PRISMA. Temuan utama menunjukkan polarisasi jelas: desentralisasi mensejahterakan melalui peningkatan efisiensi layanan publik dan penurunan kemiskinan di daerah dengan kapasitas birokrasi matang serta pengawasan ketat, seperti terlihat pada studi Siburian (2022) dan Canare (2022) di Indonesia serta Filipina, sementara di wilayah institusi rapuh justru memicu korupsi, elite capture, dan inefisiensi yang memperburuk kemiskinan, sebagaimana dikonfirmasi Ratmono *et al.* (2021) dan Khan (2021). Implikasi praktisnya menuntut penguatan tata kelola lokal melalui digitalisasi pengawasan anggaran, reformasi birokrasi, dan capacity building sebelum perluasan otonomi fiskal agar manfaat inklusif tercapai secara nyata.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bergantung pada literatur sekunder berbahasa Inggris dan Indonesia dari Scopus, sehingga berpotensi melewati perspektif non-Scopus atau studi kasus primer dari negara lain yang memperkaya konteks global. Selain itu, fokus pada periode

2015-2025 membatasi analisis evolusi jangka panjang pasca-pandemi. Saran untuk penelitian selanjutnya mencakup studi empiris kuantitatif dengan data panel daerah di Indonesia untuk menguji mediasi institusi secara kausal, perbandingan lintas-negara dengan variabel moderasi seperti budaya politik, serta integrasi mixed methods untuk validasi tematik dari wawancara pemangku kepentingan lokal guna mengatasi gap tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Alma'arif, A., Maksum, I. R., & Lutfi, A. (2025). In decentralization we trust: 24 years of research on decentralization governance and the future of the research agenda. *Corporate Law and Governance Review*, 7(2), 4–19. <https://doi.org/10.22495/clgrv7i2p1>
- Birner, R., & von Braun, J. (2015). Decentralization and poverty reduction. In Anwar Shah (Ed.), *Handbook of Multilevel Finance* (pp. 233–262). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9780857932299.00019>
- Canare, T. (2020). Decentralization, local government fiscal independence, and poverty: Evidence from Philippine provinces. *Southeast Asian Journal of Economics*, 8(1), 27–49.
- Canare, T. (2021). Decentralization and welfare: Theory and an empirical analysis using Philippine data. *Public Sector Economics*, 45(2), 235–257. <https://doi.org/10.3326/pse.45.2.4>
- Canare, T. (2022). Decentralization and welfare: Evidence from a panel of countries. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 93(2), 435–460. <https://doi.org/10.1111/apce.12339>
- Chatterjee, S., & Pal, D. (2021). Is there political elite capture in access to energy sources? Evidence from Indian households. *World Development*, 146, Article 105577. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105577>
- Chen, X. (2024). Local autonomy and service delivery: How does home rule shape the provision of local public services? *Public Management Review*, 26(11), 2847–2868. <https://doi.org/10.1080/14719037.2024.2316847>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Emzir. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data* (3rd ed.). Rajawali Pers.
- Ferrara, A. R., & Nisticò, R. (2019). Does institutional quality matter for multidimensional well-being inequalities? Insights from Italy. *Social Indicators Research*, 145(3), 1063–1105. <https://doi.org/10.1007/s11205-019-02130-9>
- Huynh, C. M., & Tran, H. N. (2021). Moderating effects of corruption and informality on the fiscal decentralization–economic growth nexus: Insights from OECD countries. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 92(4), 645–668. <https://doi.org/10.1111/apce.12304>
- Jiménez-Rubio, D., & García-Gómez, P. (2017). Decentralization of health care systems and health outcomes: Evidence from a natural experiment. *Social Science & Medicine*, 188, 69–81. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.07.003>
- Khan, S. A. (2021). Decentralization and the limits to service delivery: Evidence from Northern Pakistan. *SAGE Open*, 11(2), 1–14. <https://doi.org/10.1177/21582440211021857>
- Letelier-S, L. E., & Sáez-Lozano, J. L. (2020). Expenditure decentralization: Does it make us happier? An empirical analysis using a panel of countries. *Sustainability*, 12(18), Article 7432. <https://doi.org/10.3390/su12187432>
- Liu, L., Ding, D., & He, J. (2019). The welfare effects of fiscal decentralization: A simple model and evidence from China. *Quality & Quantity*, 53(2), 855–874. <https://doi.org/10.1007/s11135-018-0773-4>
- Mitra, A., & Pal, S. (2022). Ethnic diversity, social norms and elite capture: Theory and evidence

- from Indonesia. *Economica*, 89(354), 433–462. <https://doi.org/10.1111/ecca.12422>
- Oumbe, H. T., Ngounou, B. A., Domguia, E. N., & Pondie, T. M. (2025). Does fiscal decentralization kill inclusive growth? Evidence from African countries. *Politics & Policy*, 53(1), 112–141. <https://doi.org/10.1111/polp.12601>
- Ponce-Rodríguez, R. A., Hankla, C. R., Martinez-Vazquez, J., & Heredia-Ortiz, E. (2020). The politics of fiscal federalism: Building a stronger decentralization theorem. *Journal of Theoretical Politics*, 32(1), 3–28. <https://doi.org/10.1177/0951692819884060>
- Ratmono, D., Cholbyah, A., Cahyonowati, N., & Darsono, D. (2021). The problem of corruption in government organizations: Empirical evidence from Indonesia. *Problems and Perspectives in Management*, 19(2), 181–191. [https://doi.org/10.21511/ppm.19\(2\).2021.15](https://doi.org/10.21511/ppm.19(2).2021.15)
- Siburian, M. E. (2022). The link between fiscal decentralization and poverty: Evidence from Indonesia. *Journal of Asian Economics*, 81, Article 101494. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2022.101494>
- Singh, R., Bhattacharjee, S., & Nandy, A. (2024). Fiscal decentralization for the delivery of health and education in Indian states: An ongoing process is more desirable than a policy shift. *Journal of Policy Modeling*, 46(4), 1003–1022. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2024.04.006>
- Sudaryono. (2021). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan mix method* (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.